

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia baru pertama kali menghadapi pandemi virus sehingga pemerintah masih gagap dalam mengambil kebijakan menangani pandemi virus Covid-19 (Lubis, 2021, para. 2). Cara pandang pemerintah yang dirasa kurang tepat dalam melihat permasalahan virus Covid-19 mengakibatkan produk kebijakannya kurang berkualitas (Fisipol UGM, 2020; Laporan Covid-19, 2021; Lubis, 2021). Kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dinilai sering tidak optimal dan belum matang (Fisipol UGM, 2020; Laporan Covid-19, 2021; Lubis, 2021).

Kelambanan dan kurang sigapnya pemerintah menimbulkan banyak kritik dari masyarakat terhadap berbagai keputusan dalam menangani pandemi Covid-19, seperti upaya pembatasan mobilitas masyarakat. Alih-alih mobilitas dibatasi, pemerintah justru mempromosikan tempat wisata (Laporan Covid-19, 2021, para. 12). Hal ini menunjukkan pemerintah masih kurang antisipatif akan adanya ledakan kasus Covid-19 (Laporan Covid-19, 2021, para. 5).

Menurut data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Indonesia sudah mengalami lonjakan kasus dua kali, yaitu pada November 2020 hingga Januari 2021 dengan kasus mingguan naik hampir empat kali lipat. Lalu, pada Mei hingga Juli 2021 kasus mingguan naik hampir tujuh kali lipat (Website Resmi Penanganan COVID-19, 2021). Masing-masing puncak kasus berjumlah 89.052 kasus dan 253.600 kasus (Website Resmi Penanganan COVID-19, 2021).

Banyak masyarakat yang menyayangkan kelambanan pemerintah dalam merespons setiap ledakan kasus. Angka tersebut bisa dicegah bila dari awal pemerintah melakukan pencegahan dan pengendalian penularan yang lebih kuat dengan kebijakan yang jelas dan tepat (Laporan Covid-19, 2021, para. 5). Situasi ini diakibatkan oleh pemerintah yang mendahulukan kepentingan ekonomi di atas kesehatan masyarakat (Laporan Covid-19, 2021, para. 5). Padahal, pemerintah bertanggung jawab atas kondisi krisis, sesuai dengan amanat Undang-Undang

Dasar (UUD) 1945 dan UU Hak Asasi Manusia (HAM) yang hak kesehatan dijamin oleh negara.

Melihat dampak dari pandemi Covid-19 dan setiap kebijakan dari kinerja pemerintah dalam menanganinya yang langsung dirasakan oleh setiap warga negara, sudah seharusnya generasi muda perlu untuk ikut menyikapi dan menanggapi kondisi ini. Generasi muda memiliki peran penting untuk menentukan masa depan bangsa. Hal ini dibuktikan melalui hasil riset lembaga survei Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik (KedaiKOPI) yang menunjukkan bahwa suara pemilih muda ada sebesar 37,7 persen pada Pemilu 2019 (Mohammad, 2019, para. 13). Angka ini memperlihatkan 35 sampai 40 persen generasi muda memiliki kekuatan dan pengaruh besar terhadap hasil Pemilu 2019 (Abdi, 2018, para.1). Apalagi, pada Pemilu 2024 mendatang diperkirakan akan lebih didominasi oleh pemilih muda sebanyak 60 persen dari total keseluruhan penduduk (Pusparisa, 2020, para. 2).

Akan tetapi, seringkali generasi muda berpendapat bahwa isu politik sangat membosankan dan terkesan serius (Limilia & Ariadne, 2018, p. 46). Namun, Tamanna berpendapat bahwa ada faktor lain yang menjadi pemicu rendahnya partisipasi politik generasi muda (Tamanna, 2018, p. 744). Faktor tersebut yaitu adanya kekerasan politik, korupsi, dan janji-janji yang tidak ditepati oleh para politisi (Tamanna, 2018, p. 744).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik di kalangan generasi muda masih cukup rendah. Penelitian Salman dan Saad di Malaysia, menemukan bahwa partisipasi politik generasi muda di Malaysia melalui media sosial masih rendah karena mereka cenderung menggunakan media sosial untuk hiburan dan interaksi sosial (Salman & Saad, 2015, p. 5). Kasus serupa juga ditemukan oleh Limilia dan Fuady yang memperlihatkan bahwa partisipasi politik generasi muda di Indonesia melalui media sosial masih rendah (Limilia & Fuady, 2021, p. 49).

Sebenarnya generasi muda lebih berpotensi terpapar partisipasi politik secara *online* melalui media sosial (Salman & Saad, 2015). Jika generasi muda memanfaatkan media sosial untuk mengakses sesuatu yang berhubungan dengan politik maka dapat berpengaruh positif terhadap partisipasi politik. Kemajuan

teknologi informasi mempengaruhi partisipasi politik untuk berkembang ke dunia *online*.

Ada berbagai macam bentuk partisipasi *online*, seperti mengikuti forum politik secara *online*; membuat opini atau tulisan politik; meneruskan berita politik yang sifatnya memengaruhi orang lain; dan mengikuti petisi *online* (Chen & Stilinovic, 2020, p. 3). Adapun ahli lain Jung, Kim, dan Gil de Zúñiga memaparkan bentuk partisipasi politik *online* di berbagai kegiatan, di antara lain menyumbangkan uang untuk seorang calon atau partai politik secara daring; menghubungi kandidat atau partai melalui *email*; dan mengunjungi *website* kandidat politik (Jung et al., 2011, p. 414). Sementara itu, peneliti lain Kim dan Chen menguraikan bentuk partisipasi politik secara *online* dengan aktivitas mencari informasi lebih tentang kandidat politik atau catatan pemungutan suara; membagikan foto, video, atau audio yang berkaitan dengan kampanye atau Pemilu; meneruskan (*forward*) komentar atau tulisan orang lain kepada orang lain; meneruskan rekaman audio atau video kepada orang lain; dan berlangganan atau menerima informasi politik (Kim & Chen, 2016, p. 14).

Gil de Zúñiga et al. (Gil de Zúñiga et al., 2014, p. 614) menyatakan jika pengetahuan politik meningkat, maka warga negara jadi terdorong untuk partisipasi politik. Pengetahuan politik mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani jumlah kasus Covid-19 dapat diperoleh melalui konsumsi berita (Jung et al., 2011, p. 412). Peristiwa pandemi Covid-19 di Indonesia tidak luput dari pemberitaan politik guna melihat perkembangan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Berbagai platform media terutama media *online* memberitakan tentang kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 secara *up to date*, seperti informasi penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat pertama virus Covid-19 masuk ke Indonesia. Lalu, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat terjadi kasus Covid-19 melambung di awal dan pertengahan tahun 2021. Pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 akan meningkatkan pengetahuan politik pemilih muda.

Pada saat ini, konsumsi berita bisa dilakukan secara *online*. Konsumsi berita adalah salah satu kegiatan utama dari kehidupan sehari-hari dalam masyarakat (Mitchelstein & Boczkowski, 2010, p. 3). Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memperluas pengetahuan setiap individu, termasuk generasi muda. Apalagi generasi muda termasuk generasi yang diasosiasikan dengan media baru (Salman & Saad, 2015, p. 2). Hal ini karena generasi muda terlahir dan hidup ketika teknologi informasi semakin canggih.

Ketika konsumsi berita politik secara *online* meningkat, pengetahuan mereka menjadi komprehensif (Mitchelstein & Boczkowski, 2010, p. 3). Terutama generasi muda cenderung bisa menemukan berita dan informasi lebih kredibel di internet (Mitchelstein & Boczkowski, 2010, p. 9). Maka dari itu, warga negara yang mengonsumsi berita politik cenderung memiliki pemahaman atau pengetahuan yang lebih baik tentang isu politik (Prestianta, 2014, p. 81). Pengetahuan politik yang baik menjadikan masing-masing warga negara mengerti sikap dan partisipasi yang harus dilakukan dalam sebuah proses politik (Komisi Pemilihan Umum, 2015, p.7).

Survei platform Baca Berita (BaBe) menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19 pengguna di bawah 25 tahun cenderung mengonsumsi konten yang membahas kegiatan yang bisa dilakukan di rumah (Tupani, 2020, para. 11). Akan tetapi, secara keseluruhan BaBe menemukan 85 persen pengguna melihat berita dan informasi mengenai Covid-19 selama lebih dari sekali sehari (Tupani, 2020, para. 10). Lalu, tren lainnya yang ditemukan adalah berita Covid-19 dengan topik peraturan dukungan pemerintah paling populer dikonsumsi oleh pengguna (Tupani, 2020, para. 11).

Pengetahuan politik merupakan salah satu indikator dan kontributor penting untuk meningkatkan partisipasi politik (de Vreese & Boomgaarden, 2006; Gil de Zúñiga et al., 2014; Halim & Jauhari, 2019). Melalui kontribusi media *online* sebagai wadah generasi muda untuk mengonsumsi berita politik di era pandemi, secara tidak langsung konsumsi berita politik memiliki peran untuk meningkatkan pengetahuan politik (Banducci & Xezonakis, 2010, p. 3; de Vreese & Boomgaarden, 2006, p. 317; Jung et al., 2011, p. 410). Ketika pengetahuan politik

telah komprehensif, generasi muda dapat mengetahui dan memahami masalah yang tampaknya perlu untuk mendorong keterlibatan politik.

Melihat fenomena dan permasalahan ini peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh tingkat konsumsi berita politik di era pandemi Covid-19 terhadap partisipasi politik pemilih muda dengan pengetahuan politik sebagai variabel mediator? Konsumsi berita dilihat dari jenis platform, frekuensi, dan durasi yang dikonsumsi pengguna secara *online*, sedangkan tingkat pengetahuan politik akan diukur dengan pemahaman khusus dari kinerja pemerintah Indonesia terkait upaya dan kebijakannya dalam menangani kasus Covid-19. Lalu, partisipasi politik ditinjau dari partisipasi politik secara *online*. Mengalihkan fokus ke dampak secara tidak langsung dari konsumsi berita politik terhadap pengetahuan politik khusus memungkinkan peneliti untuk melihat pengaruh ke partisipasi politik oleh pemilih muda yang belum terjawab dalam penelitian sebelumnya (de Vreese & Boomgaarden, 2006; Gil de Zúñiga et al., 2014; Halim & Jauhari, 2019; Jung et al., 2011; Yang & DeHart, 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar pengamatan fenomena dan masalah penelitian yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini berupaya menjawab apakah ada pengaruh tingkat konsumsi berita politik di era pandemi covid-19 terhadap partisipasi politik pemilih muda dengan pengetahuan politik sebagai variabel mediator?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka menurunkan sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut ini.

1. Apakah ada pengaruh tingkat konsumsi berita politik di era pandemi Covid-19 terhadap partisipasi politik pemilih muda?
2. Apakah ada pengaruh tingkat konsumsi berita politik di era pandemi Covid-19 terhadap pengetahuan politik sebagai variabel mediator?

3. Apakah ada pengaruh tingkat pengetahuan politik sebagai variabel mediator terhadap partisipasi politik pemilih muda?
4. Apakah ada pengaruh tingkat konsumsi berita politik di era pandemi Covid-19 terhadap partisipasi politik pemilih muda dengan pengetahuan politik sebagai variabel mediator?

1.4 Tujuan Penelitian

Demikian, berdasarkan pertanyaan penelitian yang diturunkan dari rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut ini.

1. Mengetahui pengaruh tingkat konsumsi berita politik di era pandemi Covid-19 terhadap partisipasi politik pemilih muda,
2. Mengetahui pengaruh tingkat konsumsi berita politik di era pandemic Covid-19 terhadap pengetahuan politik sebagai variabel mediator,
3. Mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan politik sebagai variabel mediator terhadap partisipasi politik pemilih muda,
4. Mengetahui pengaruh tingkat konsumsi berita politik di era pandemi Covid-19 terhadap partisipasi politik pemilih muda dengan pengetahuan politik sebagai variabel mediator.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode survei, dan variabel mediator sehingga diharapkan dapat menjadi referensi di kemudian hari ketika memilih pendekatan kuantitatif, metode survei, dan variabel mediator. Melalui kajian ini, peneliti di masa depan dapat mengembangkan indikator untuk mengukur konsumsi berita *online*, partisipasi politik, dan pengetahuan politik yang dipakai dalam penelitian ini. Lalu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh tingkat konsumsi berita politik di era pandemi Covid-

19 terhadap partisipasi politik pemilih muda dengan pengetahuan politik sebagai variabel mediator.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan ke pemilih muda mengenai pengaruh tingkat konsumsi berita politik di era pandemi Covid-19 terhadap partisipasi politik pemilih muda dengan pengetahuan politik sebagai variabel mediator. Peneliti berharap hasil riset dapat dijadikan motivasi pemilih untuk meningkatkan konsumsi berita politik, partisipasi politik, dan menambah pengetahuan politik. Diharapkan hasil dari kajian ini dapat menjadi tolak ukur dalam konsumsi berita politik, partisipasi politik pemilih muda, dan pengetahuan politik.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Pemilih muda perlu mengetahui, memahami, dan terlibat dalam setiap isu politik yang terjadi di Indonesia. Demikian, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kelompok pemilih muda untuk lebih sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses demokrasi. Hal ini karena pemilih muda juga memiliki hak memberikan suara untuk menentukan masa depan bangsa melalui partisipasi politik. Selain itu, diharapkan dapat memberi dampak ke pemilih muda agar tidak hanya menggunakan media *online* untuk kegiatan sosialisasi tetapi juga konsumsi berita politik dan partisipasi politik secara *online*.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Peneliti tidak memakai variabel tambahan lainnya yang diperkirakan bisa mendorong partisipasi politik, seperti budaya politik. Hal ini dibuktikan melalui hasil penelitian yang masih tersisa 47.6 persen untuk kontribusi pengaruh variabel lain terhadap partisipasi politik. Dengan demikian, peneliti hanya melihat pengaruh konsumsi berita terhadap partisipasi politik dengan pengetahuan politik. Adapun,

dalam proses pengolahan data peneliti menemukan kekurangan untuk melihat faktor responden mengonsumsi berita.